

Article Informations
Corresponding Email:
dedemiun123@gmail.com

Received: 29/05/2026; Accepted:
05/06/2026; Published: 30/06/2026

KEBIJAKAN KEAMANAN TURKI TERHADAP KELOMPOK KURDI BERSENJATA DI IRAK DAN SURIAH PASCA KEGAGALAN PROSES PERDAMAIAN DOLMABAHÇE 2020-2024

Azzahra Sarah Nabila

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini membahas kebijakan keamanan Turki terhadap kelompok Kurdi bersenjata di Irak dan Suriah pasca kegagalan Proses Dolmabahce (2015). Pergeseran dari dialog ke strategi militeristik diarahkan pada PKK di Irak Utara dan YPG di Suriah Utara sebagai ancaman eksistensial. Dengan pendekatan kualitatif, konstruktivisme, dan konsep sekuritisasi Copenhagen School, penelitian ini menganalisis klaim ancaman, penerimaan audiens, tindakan luar biasa, dan narasi. Hasilnya, narasi ancaman terhadap PKK/YPG diterima luas, diperkuat media, dan melegitimasi operasi lintas batas seperti Operation Claw. Dukungan partai nasionalis serta dinamika geopolitik ikut memperkuat kebijakan ini. Kesimpulannya, strategi militeristik Turki menekan kelompok Kurdi, namun memicu krisis kemanusiaan dan siklus kekerasan yang menghambat solusi damai jangka panjang.

Kata Kunci: Kebijakan keamanan Turki, Kurdi, PKK, YPG, sekuritisasi, Irak, Suriah.

Abstract

This study discusses Turkey's security toward armed Kurdish groups in Iraq and Syria after the failure of the Dolmabahce Peace Process (2015). The shift from dialogue to militaristic strategy targeted the PKK in northern Iraq and the YPG in northern Syria as existential threats. Using a qualitative approach, constructivism, and the Copenhagen School's securitization framework, the research analyzes threat claims, audience acceptance, extraordinary measures, and narratives. Findings show that the threat narrative against the PKK/YPG gained broad acceptance, was reinforced by the media. And legitimized cross-border operations such as Operation Claw, supported by nationalist parties and regional geopolitics. The study concludes that Turkey's militaristic approach has constrained Kurdish groups but triggered humanitarian crises and cycles of violence. Hindering prospects for a long-term peaceful solution.

Keywords: Turkey's security policy, Kurds, PKK, YPG, securitization, Iraq, Syria.

1. PENDAHULUAN

Sejak 2020, kebijakan keamanan Turki terhadap kelompok Kurdi bersenjata di Irak dan Suriah mengalami peningkatan intensitas dan perluasan operasi. Fokus utama ditujukan pada PKK di Irak utara dan YPG di Suriah timur laut, yang oleh Ankara dipandang sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan nasional dan ditetapkan sebagai organisasi teroris.¹ Pergeseran menuju pendekatan militeristik ini tidak lepas dari kegagalan Proses Perdamaian Dolmabahce pada 2015, yang sebelumnya membuka peluang dialog antara pemerintah Turki dan perwakilan kelompok Kurdi bersenjata.²

Pasca kegagalan proses tersebut, narasi yang menempatkan identitas Kurdi bersenjata sebagai “ancaman” kembali menguat dalam politik domestik Turki. Pemerintah memperkuat operasi lintas batas seperti Operation Claw di Irak, sekaligus melanjutkan intervensi militer di Suriah.³ Kebijakan ini didorong pula oleh faktor domestik, terutama dukungan partai-partai nasionalis yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Erdogan, serta dinamika geopolitik kawasan, khususnya ketegangan dengan Amerika Serikat yang menjalin kemitraan dengan YPG dalam perang melawan ISIS.⁴

Pendekatan militer agresif tersebut memang berhasil menekan kapasitas PKK dan YPG, serta menghalangi terbentuknya entitas politik Kurdi otonom di sepanjang perbatasan Turki. Namun, strategi ini menimbulkan dampak serius berupa lonjakan pengungsi, memburuknya krisis kemanusiaan, serta tuduhan pelanggaran hukum humaniter internasional terhadap pasukan Turki dan kelompok proksi bersenjatanya.⁵ Kritik internasional terutama

¹ Güneş, Cengiz. *The Kurdish Peace Process in Turkey: Genesis, Evolution and Prospects*. Routledge, 2020.

² Talha Köse, “Securitization of the Kurdish Question in Turkey: The Role of State Identity and Political Discourses,” *Insight Turkey*, vol. 21, no. 4, 2019, pp. 45–63.

³ Republic of Turkey Ministry of National Defence. *Press Release on the Claw-Lock Operation*, 2022

⁴ Mehmet Özdemir, “Turkey's Intervention in Syria: A Strategic Approach to the Kurdish Question,” *International Relations Journal*, vol. 11, no. 1, 2020, pp. 112–128.

⁵ Human Rights Watch. *Turkey: Human Rights Concerns in Military Operations in Northern Syria*, 2020.

menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia serta kegagalan Ankara menyelesaikan akar konflik etno-politik yang mendasarinya.

Secara lebih luas, kebijakan keamanan Turki mencerminkan perubahan orientasi politik luar negeri di bawah Erdogan, yang semakin tegas dan militeristik setelah kudeta 2016 dan transisi ke sistem presidensial 2017. Perubahan ini ditandai dengan melemahnya orientasi pro-Barat dan semakin pragmatisnya hubungan dengan Rusia maupun Iran, dalam perspektif teori sekuritisasi, strategi Ankara merepresentasikan konstruksi ancaman eksistensial yang membenarkan tindakan militer di luar jalur politik konvensional.⁶ Dengan demikian, meski berhasil melemahkan kelompok Kurdi bersenjata, kebijakan militeristik Turki justru memperkuat siklus ketidakamanan dan memperpanjang konflik berkepanjangan. Kondisi ini menunjukkan dilema keamanan klasik, di mana upaya meningkatkan keamanan nasional justru memperburuk instabilitas kawasan dan menghambat tercapainya solusi damai berkelanjutan.⁷

2. PEMBAHASAN

2.1 Klaim ancaman

Pemerintah Turki menegaskan klaim ancamannya dengan menyamakan YPG di Suriah sebagai perpanjangan tangan PKK, yang telah lama dicap sebagai organisasi teroris oleh Turki, NATO, Uni Eropa, dan Amerika Serikat.⁸ Presiden Recep Tayyip Erdogan menyebut keberadaan YPG di utara Suriah sebagai bagian dari rencana pembentukan “koridor teror” yang secara langsung mengancam kedaulatan dan keamanan nasional.⁹ Dengan demikian, narasi ancaman yang dibangun Ankara tidak hanya berkaitan dengan potensi serangan teror di dalam negeri, melainkan juga

⁶ Barry Buzan, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner, 1998.

⁷ Michael E. Brown, “The Security Dilemma and Ethnic Conflict,” *World Politics*, vol. 49, no. 4, 1997, pp. 553–573.

⁸ Talha Köse, “Securitization of the Kurdish Question in Turkey: The Role of State Identity and Political Discourses,” *Insight Turkey*, vol. 21, no. 4, 2019, pp. 45–63.

⁹ Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, *Turkey’s Position on the PKK/YPG Issue*, 2021

meluar ke ranah geopolitik, khususnya upaya mencegah terbentuknya entitas otonom Kurdi di sepanjang perbatasan selatan.¹⁰

2.2 Penerimaan Audiens

Klaim Ancaman Turki memperoleh legitimasi di tingkat domestik maupun internasional. Dalam negeri, dukungan datang dari AKP dan MHP yang memandang isu Kurdi sebagai masalah keamanan, bahkan CHP pun kritis terhadap Erdogan dalam isu demokrasi dan ekonomi tidak menolak operasi lintas batas terhadap PKK/YPG, sehingga mencerminkan konsensus nasional.¹¹ Marasi ini juga diterima publik, diperkuat media nasional yang menggaambarkan operasi militer sebagai tindakan heroik demi melindungi kedaulatan negara.¹² Tingkat regional, Ankara memperkuat koordinasi dengan pemerintah Irak, khususnya terkait keberadaan PKK di Sinjar dan Qandil.¹³ Sementara di ranah internasional, meski terjadi ketegangan dengan Amerika Serikat akibat dukungannya terhadap SDF, legitimasi Turki kuat karena PKK sejak lama tercatat sebagai organisasi teroris oleh komunitas internasional.¹⁴

2.3 Tindakan Luar Biasa

Sejak 2020, kebijakan keamanan Turki terhadap kelompok Kurdi bersenjata ditandai dengan peningkatan intensitas operasi lintas batas yang dikenal sebagai *Claw Operations*. Rangkaian operasi tersebut, seperti *Claw-Eagle*, *Claw-Tiger*, dan *Claw-Lock*, secara khusus difokuskan untuk menghantam basis PKK di wilayah pegunungan Irak Utara, terutama di Qandil, Sinjar, dan Hakurk.¹⁵ Operasi ini tidak terbatas pada serangan udara, melainkan juga disertai dengan pengerahan pasukan darat dan pembangunan pangkalan militer permanen di sepanjang perbatasan Irak.

¹⁰ Mehmet Özdemir, "Turkey's Intervention in Syria: A Strategic Approach to the Kurdish Question," *International Relations Journal*, vol. 11, no. 1, 2020, pp. 112–128.

¹¹ Talha Köse, "Securitization of the Kurdish Question in Turkey: The Role of State Identity and Political Discourses," *Insight Turkey*, vol. 21, no. 4, 2019, pp. 45–63.

¹² Ayşe Zarakol, "Media and the Construction of Security Narratives in Turkey," *Middle East Critique*, vol. 29, no. 3, 2020, pp. 267–285.

¹³ Republic of Turkey Ministry of National Defence, *Press Release on the Claw-Lock Operation*, 2022.

¹⁴ European Union, *Council Decision on the Terrorist List*, 2021; U.S. Department of State, *Foreign Terrorist Organizations*, 2022.

¹⁵ Republic of Turkey Ministry of National Defence, *Press Release on the Claw-Lock Operation*, 2022.

Langkah ini mencerminkan pergeseran strategi Ankara dari sekadar tindakan represif jangka pendek menjadi upaya membangun kehadiran militer jangka panjang.¹⁶ Dengan cara ini, Turki berusaha menutup ruang gerak PKK sekaligus mengontrol jalur logistik lintas perbatasan yang selama ini menjadi sumber kekuatan kelompok tersebut.

Sementara itu, di Suriah, Ankara menunjukkan respons militer yang serupa, terutama setelah terjadinya serangan bom di Istanbul pada November 2022 yang dituding dilakukan oleh jaringan PKK/YPG.¹⁷ Sebagai balasan, Turki melancarkan operasi udara skala besar yang menargetkan infrastruktur militer dan logistik YPG di wilayah utara Suriah, termasuk di Ayn al-Arab (Kobane) dan Qamishli.¹⁸ Operasi ini kembali menegaskan klaim ancaman pemerintah Turki yang melihat keberadaan YPG sebagai perpanjangan tangan PKK dan bagian dari upaya membentuk “koridor teror” di sepanjang perbatasan selatan.¹⁹ Dengan meningkatnya legitimasi politik dan dukungan domestik, Ankara berhasil meyakinkan publik bahwa kondisi tersebut membenarkan penggunaan kekuatan militer lintas batas secara besar-besaran. Dari perspektif *Copenhagen School*, dinamika ini mencerminkan praktik sekuritisasi, di mana suatu isu yang dipersepsikan sebagai ancaman eksistensial memungkinkan negara mengambil langkah-langkah luar biasa di luar kebijakan normal.²⁰

2.4 Konstruksi Sosial dan Narasi

Pemerintah Turki secara konsisten menggambarkan operasi militernya terhadap PKK dan YPG sebagai bagian dari perang global melawan terorisme. Melalui pernyataan resmi Kementerian Pertahanan maupun pidato Presiden Recep Tayyip Erdoğan, operasi lintas batas dipresentasikan sebagai “tindakan pencegahan” (*preventive measures*) untuk melindungi warga Turki

¹⁶ Oytun Orhan, “Turkey’s Cross-Border Military Operations in Northern Iraq,” *ORSAM Report*, no. 268, 2021.

¹⁷ International Crisis Group, *Turkey’s PKK Conflict: A Visual Explainer*, 2023.

¹⁸ Fehim Taştekin, “Turkey’s New Syria Operation and Its Strategic Calculations,” *Al-Monitor*, 2022.

¹⁹ Mehmet Özdemir, “Turkey’s Intervention in Syria: A Strategic Approach to the Kurdish Question,” *International Relations Journal*, vol. 11, no. 1, 2020, pp. 112–128.

²⁰ Barry Buzan, Ole Wæver, and Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis* (Boulder: Lynne Rienner, 1998).

dari potensi ancaman serangan teror lintas perbatasan.²¹ Narasi ini diperkuat oleh media nasional yang menyoroti keberhasilan operasi militer, menampilkan PKK/YPG sebagai aktor yang merusak stabilitas regional dan menghambat perdamaian.²² Selain itu, pemerintah menggunakan wacana ini untuk memperkuat identitas nasional, dengan menekankan bahwa perjuangan melawan PKK/YPG merupakan bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan negara terhadap ancaman separatisme.²³ Dengan demikian, isu keamanan tidak hanya diartikulasikan sebagai kepentingan militer, tetapi juga sebagai simbol nasionalisme dan eksistensi negara.

Pada periode 2020 hingga 2024, strategi keamanan Turki terhadap kelompok Kurdi bersenjata menunjukkan perubahan signifikan. Target utama kebijakan ini adalah PKK di Irak Utara dan YPG, yang menjadi inti dari Syrian Democratic Forces (SDF) di Suriah.²⁴ Pergeseran tersebut terlihat dalam beberapa dimensi: pertama, semakin intensifnya operasi lintas-batas yang dikenal sebagai *Claw Operations* (*Claw-Eagle*, *Claw-Tiger*, *Claw-Lock*) untuk menekan keberadaan PKK di Irak; kedua, pembentukan kehadiran militer permanen berupa pangkalan di wilayah perbatasan Irak untuk mengontrol jalur logistik; ketiga, peningkatan penggunaan drone bersenjata seperti Bayraktar TB2 dan Anka-S dalam menargetkan infrastruktur YPG di Suriah; dan keempat, perubahan pola kerja sama keamanan dengan pemerintah Irak, khususnya dalam koordinasi operasi anti-PKK di kawasan Sinjar dan Hakurk.²⁵ Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa kebijakan Turki tidak lagi bersifat temporer, melainkan berorientasi pada strategi jangka panjang dalam mengelola ancaman dari kelompok Kurdi bersenjata.

²¹ Republic of Turkey Ministry of National Defence, *Press Release on Cross-Border Operations*, 2021.

²² International Crisis Group, *Turkey's PKK Conflict: A Visual Explainer*, 2023.

²³ Talha Köse, "Securitization of the Kurdish Question in Turkey: The Role of State Identity and Political Discourses," *Insight Turkey*, vol. 21, no. 2, 2019, pp. 35–52.

²⁴ Mehmet Özdemir, "Turkey's Intervention in Syria: A Strategic Approach to the Kurdish Question," *International Relations Journal*, vol. 11, no. 1, 2020, pp. 112–128.

²⁵ Oytun Orhan, "Turkey's Cross-Border Military Operations in Northern Iraq," *ORSAM Report*, no. 268, 2021.

Dengan empat indikator diatas, pemerintah Turki mengembangkan pembaharuan terkait kebijakannya terhadap kelompok kurdi bersenjata di Irak dan Suriah, yaitu :

1. Intensifikasi Operasi Lintas Batas dan Pelembagaan kehadiran di Irak 2020-2024

Memasuki awal 2020-an, kebijakan keamanan Turki terhadap Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) di Irak utara memasuki fase intensifikasi. Ankara meluncurkan operasi besar seperti *Claw-Eagle*, *Claw-Tiger*, dan *Claw-Lock*, dengan mengombinasikan kekuatan udara dan darat. Jet tempur F-16, pesawat F-4, serta drone Bayraktar TB2 digunakan untuk menghantam jalur logistik PKK, sementara pasukan komando diterjunkan ke wilayah pegunungan strategis seperti Qandil, Zap, Metina, dan Avasin-Basyan, yang selama ini menjadi basis utama PKK.²⁶

Berbeda dari pola sebelumnya yang bersifat serangan cepat, strategi baru ini berfokus pada pelembagaan kehadiran militer permanen. Ankara membangun pos pengawasan, pangkalan taktis, serta jalur logistik hingga 40 km ke dalam wilayah Irak. Kehadiran ini memungkinkan Turki menciptakan buffer zone de facto untuk mempersempit ruang gerak PKK, memutus rantai suplai, dan mencegah infiltrasi ke wilayah Turki.²⁷

Selain mengandalkan militer, Turki juga mengoptimalkan jalur diplomasi dengan Baghdad dan Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG). Melalui pertukaran intelijen, koordinasi operasi, dan akses logistik, Ankara memperoleh legitimasi atas keberadaannya di Irak.²⁸ Pendekatan ini tidak hanya memperkuat operasi di lapangan, tetapi juga mengurangi risiko konflik diplomatik, sekaligus meneguhkan

²⁶ Republic of Turkey Ministry of National Defence, *Press Release on the Claw-Eagle and Claw-Tiger Operations*, 2020.

²⁷ International Crisis Group, *Turkey's PKK Conflict: A Visual Explainer*, 2022.

²⁸ Öztürk, Ahmet Erdi. "Turkey's Cross-Border Operations in Iraq: Legitimacy, Strategy, and Regional Reactions." *Middle East Policy*, vol. 28, no. 4, 2021, pp. 68–81.

posisi Turki sebagai aktor dominan dalam pengelolaan keamanan perbatasan.²⁹

2. Perubahan Arsitektur kerja sama dengan Irak (2023-2024)

Sejak 2020, hubungan keamanan Turki-Irak berkembang dari koordinasi ad-hoc menjadi mekanisme resmi yang mencakup pertukaran intelijen, perencanaan operasi, dan penetapan zona operasi. Skema ini memberi Turki legitimasi atas kehadiran militernya, sementara Baghdad memperoleh kendali lebih besar terhadap aktivitas militer asing di wilayahnya.³⁰

Pemerintah Pusat Irak semakin aktif dalam pengaturan operasi, termasuk pemberian izin bagi Turki memperluas kehadiran militernya di kawasan strategis seperti Sinjar dan Makhmour.³¹ Dibentuk pula pusat koordinasi bersama yang berfungsi sebagai forum pertukaran informasi serta sinkronisasi operasi kontra-PKK.³²

Kerja sama tidak hanya terbatas pada aspek militer, melainkan juga merambah ke sektor ekonomi melalui proyek infrastruktur strategis seperti jalur kereta, jalan lintas perbatasan, dan jaringan pipa energi.³³ Proyek-proyek ini memberi insentif bagi Baghdad dan Erbil untuk menerima keberlanjutan kehadiran Turki, sekaligus memperkuat posisi Ankara sebagai mitra keamanan sekaligus ekonomi utama di kawasan.³⁴

3. Eskalasi Perang Drone dan PEnargetan Infrastruktur SDF di Suriah (2023-2024)

Pada periode 2023-2024, Turki semakin mengandalkan drone bersenjata seperti Bayraktar TB2, Anka-S, dan Akinci untuk menyerang posisi SDF/YPG di Suriah, termasuk fasilitas komando,

²⁹ Güneş, Cengiz. *The Kurdish Peace Process in Turkey: Genesis, Evolution and Prospects*. Routledge, 2020.

³⁰ International Crisis Group, *Managing Turkey's PKK Conflict: The Case of Iraqi Kurdistan*, Middle East Report No. 197, 2022.

³¹ Republic of Turkey Ministry of National Defence, *Press Release on the Claw-Lock Operation*, 2022.

³² Al-Monitor, "Turkey, Iraq Agree on Joint Security Coordination Center," 2023.

³³ Middle East Eye, "Turkey, Iraq to Build New Trade and Energy Corridors," 2023.

³⁴ Gallia Lindenstrauss, *Turkey-Iraq Relations in a Changing Regional Order*, Institute for National Security Studies (INSS), 2023.

gudang senjata, serta infrastruktur energi strategis.³⁵ Strategi ini mencerminkan kekhawatiran Ankara terhadap konsolidasi SDF di wilayah timur laut Suriah yang didukung Amerika Serikat, yang dipandang dapat memperkuat basis politik-militer YPG di sepanjang perbatasan.³⁶

Selain target militer, operasi udara juga diarahkan ke infrastruktur vital seperti pembangkit listrik dan fasilitas minyak yang menjadi sumber utama pendanaan SDF.³⁷ Dengan cara ini, Turki berupaya melemahkan kapasitas operasional dan keuangan SDF sekaligus menekan dukungan publik terhadap kelompok tersebut.

Namun, kampanye drone ini memicu ketegangan diplomatik dengan Amerika Serikat, yang masih menganggap SDF sebagai mitra kontra-ISIS, serta dengan Rusia yang memiliki kepentingan berbeda di Suriah.³⁸ Meski begitu, Ankara tetap menjadikan drone sebagai instrumen utama kebijakan keamanannya karena efektivitasnya dalam melumpuhkan target dengan risiko minimal bagi pasukan Turki.³⁹

4. Konsistensi Kebijakan “Zona aman/penyangga” di Suriah (pasca-2019-2024)

Sejak Operasi *Peace Spring* 2019, Turki konsisten membangun zona aman di perbatasan timur laut Suriah guna memisahkan wilayahnya dari area kendali YPG/SDF yang dianggap cabang PKK. Tujuan utama kebijakan ini adalah mencegah infiltrasi lintas batas, menekan ancaman teror, serta menyediakan ruang bagi pemulangan pengungsi Suriah.⁴⁰

Antara 2020–2024, Ankara memperkuat zona aman melalui kehadiran militer permanen, patroli gabungan dengan Rusia berdasarkan

³⁵ Daily Sabah, “Turkey’s Claw-Eagle Operation Targets PKK in Northern Iraq,” 2020.

³⁶ Özdemir, Mehmet. *Turkey’s Intervention in Syria: A Strategic Approach to the Kurdish Question*. *International Relations Journal*, vol. 11, no. 1, 2020.

³⁷ Güneş, Cengiz. *The Kurdish Peace Process in Turkey: Genesis, Evolution and Prospects*. Routledge, 2020.

³⁸ International Crisis Group. *Mitigating the Impact of the Syrian Conflict on Turkey*. ICG Report No. 264, 2021.

³⁹ Republic of Turkey Ministry of National Defence. *Press Release on Cross-Border Operations*, 2023.

⁴⁰ International Crisis Group, *Turkey’s Safe Zone in Syria*, 2020.

Kesepakatan Sochi 2019, dan penggunaan drone tempur untuk pengawasan serta serangan presisi.⁴¹ Di wilayah yang dikuasai, seperti Tal Abyad dan Ras al-Ain, Turki membentuk pemerintahan lokal pro-Ankara, membangun infrastruktur, dan memfasilitasi kepulangan pengungsi.⁴²

Meskipun menghadapi tekanan dari AS, Rusia, dan Damaskus, kebijakan ini tetap menjadi pilar utama strategi keamanan Turki hingga 2024, dengan fungsi ganda: menekan ruang gerak YPG/SDF serta memperkuat pengaruh politik dan keamanan Turki di Suriah utara.⁴³

5. Dimensi Sinjar (Irak) pasca-Perjanjian 2020: Stabilitas macet

Perjanjian Sinjar yang ditandatangani pada Oktober 2020 antara Pemerintah Irak dan KRG dengan mediasi PBB bertujuan mengakhiri dualisme otoritas di wilayah Sinjar melalui penarikan kelompok bersenjata non-resmi, pembentukan pemerintahan sipil, dan integrasi keamanan lokal.⁴⁴ Perjanjian ini juga diharapkan memungkinkan pemulangan pengungsi Yazidi yang terusir sejak genosida ISIS pada 2014.⁴⁵ Namun, implementasinya berjalan lambat karena YBŞ kelompok afiliasi PKK, menolak hengkang dengan alasan melindungi komunitas Yazidi, sehingga memicu ketegangan dengan pasukan Irak dan menghambat normalisasi.⁴⁶

Selain hambatan internal, Turki memandang Sinjar sebagai jalur strategis PKK dan secara rutin melancarkan serangan udara maupun drone, yang kerap menimbulkan korban sipil.⁴⁷ Kehadiran banyak aktor, termasuk Peshmerga dan milisi pro-Iran, membuat mekanisme keamanan bersama sulit diterapkan.⁴⁸ Akibatnya, hingga 2024 Sinjar tetap rentan, dengan pemulangan pengungsi yang lambat,

⁴¹ Republic of Turkey Ministry of Defence, *Press Release on Joint Patrols*, 2021.

⁴² Stein, Aaron. *Turkey's Border Policy in Northern Syria*. Atlantic Council, 2022.

⁴³ Gunter, Michael. *The Kurds in the Middle East*. Lexington Books, 2021.

⁴⁴ United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI), *Sinjar Agreement Overview*, 2020.

⁴⁵ Human Rights Watch, *Iraq: Yazidi Survivors Still Waiting for Justice*, 2021.

⁴⁶ Knights, Michael. "The Sinjar Agreement: Implementation Challenges." *Washington Institute PolicyWatch*, 2021.

⁴⁷ International Crisis Group, *Turkey's PKK Conflict: The Sinjar Dimension*, 2022.

⁴⁸ Natali, Denise. *The Kurdish Quasi-State*. Syracuse University Press, 2021.

infrastruktur terbatas, dan risiko konflik bersenjata yang berkelanjutan.⁴⁹

6. Pola respons “*Retaliatory Strikes*” (2023-2024)

Pada 2023-2024, Turki semakin menonjolkan retaliatory strikes terhadap PKK di Irak dan YPG di Suriah sebagai respons atas serangan lintas batas. Serangan ini dilakukan cepat, terukur, dan langsung, biasanya hanya dalam hitungan jam atau hari setelah insiden terjadi.

⁵⁰Ankara mengombinasikan jet tempur F-16, drone bersenjata Bayraktar TB2/Anka-S, serta artileri lintas batas untuk menghantam pos komando, gudang senjata, dan jalur logistik.⁵¹

Strategi ini memiliki dua tujuan utama: pertama, sebagai deterrence untuk menegaskan bahwa setiap serangan akan dibalas segera; kedua, untuk melemahkan kemampuan lawan melalui penghancuran infrastruktur vital.⁵² Selain efektif secara militer, strategi ini juga meningkatkan risiko korban sipil dan berpotensi memperburuk eskalasi regional.⁵³

Sejak 2020, kebijakan Turki mengalami pergeseran dari serangan cepat menjadi operasi berkelanjutan, termasuk pendirian basis militer permanen di Irak dan penggunaan drone secara masif. Langkah ini memperkuat zona penyangga perbatasan, tetapi juga memunculkan tantangan diplomatik dengan aktor eksternal serta menimbulkan ketegangan di wilayah sensitif seperti Sinjar.⁵⁴ Penulis menilai, meski efektif secara taktis, strategi ini hanya akan berkelanjutan jika diimbangi dengan pendekatan politik dan kerja sama regional.⁵⁵

⁴⁹ International Organization for Migration (IOM), *Return and Recovery in Sinjar*, 2023.

⁵⁰ International Crisis Group, *Turkey's PKK Conflict: The Rising Toll*, 2023.

⁵¹ Republic of Turkey Ministry of National Defence, *Press Release on Cross-Border Operations*, 2023.

⁵² Güneş, Cengiz. *The Kurdish Peace Process in Turkey*. Routledge, 2020.

⁵³ Amnesty International, *Syria: Civilian Impact of Turkish Airstrikes*, 2023.

⁵⁴ Özdemir, Mehmet. “Turkey's Intervention in Syria.” *International Relations Journal*, vol. 11, no. 1, 2020.

⁵⁵ Köse, Talha. “Securitization of the Kurdish Question in Turkey.” *Insight Turkey*, vol. 21, no. 3, 2019.

3. KESIMPULAN

Pasca kegagalan Proses Perdamaian Dolmabahçe, kebijakan keamanan Turki terhadap PKK dan YPG bergeser dari diplomasi menuju strategi militer agresif. Pemerintah di bawah Recep Tayyip Erdoğan melakukan sekuritisasi dengan membingkai kelompok Kurdi bersenjata sebagai ancaman eksistensial, yang kemudian melegitimasi operasi lintas batas seperti *Claw*, *Olive Branch*, dan *Peace Spring*.

Kebijakan ini bertujuan mencegah terbentuknya entitas Kurdi di perbatasan, memutus jalur logistik lintas batas, serta memperkuat posisi geopolitik Turki. Meski efektif melemahkan kapasitas PKK/YPG, strategi tersebut menuai kritik karena memicu krisis kemanusiaan, pelanggaran hukum humaniter, dan menciptakan dilema keamanan yang justru memperpanjang konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Monitor. "Turkey, Iraq Agree on Joint Security Coordination Center." 2023.
- Amnesty International. Syria: Civilian Impact of Turkish Airstrikes. 2023.
- Brown, Michael E. "The Security Dilemma and Ethnic Conflict." *World Politics*, vol. 49, no. 4, 1997, pp. 553–573.
- Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner, 1998.
- Daily Sabah. "Turkey's Claw-Eagle Operation Targets PKK in Northern Iraq." 2020.
- European Union. Council Decision on the Terrorist List. 2021.
- Fehim Taştekin. "Turkey's New Syria Operation and Its Strategic Calculations." Al-Monitor. 2022.
- Gallia Lindenstrauss. *Turkey-Iraq Relations in a Changing Regional Order*. Institute for National Security Studies (INSS), 2023.
- Güneş, Cengiz. *The Kurdish Peace Process in Turkey: Genesis, Evolution and Prospects*. Routledge, 2020.
- Gunter, Michael. *The Kurds in the Middle East*. Lexington Books, 2021.

Human Rights Watch. Turkey: Human Rights Concerns in Military Operations in Northern Syria. 2020.

Human Rights Watch. Iraq: Yazidi Survivors Still Waiting for Justice. 2021.

International Crisis Group. Turkey's Safe Zone in Syria. 2020.

International Crisis Group. Mitigating the Impact of the Syrian Conflict on Turkey. ICG Report No. 264, 2021.

International Crisis Group. Managing Turkey's PKK Conflict: The Case of Iraqi Kurdistan. Middle East Report No. 197, 2022.

International Crisis Group. Turkey's PKK Conflict: The Sinjar Dimension. 2022.

International Crisis Group. Turkey's PKK Conflict: A Visual Explainer. 2022.

International Crisis Group. Turkey's PKK Conflict: The Rising Toll. 2023.

International Organization for Migration (IOM). Return and Recovery in Sinjar. 2023.

Knights, Michael. "The Sinjar Agreement: Implementation Challenges." Washington Institute PolicyWatch, 2021.

Köse, Talha. "Securitization of the Kurdish Question in Turkey: The Role of State Identity and Political Discourses." *Insight Turkey*, vol. 21, no. 2, 2019.

Middle East Eye. "Turkey, Iraq to Build New Trade and Energy Corridors." 2023.

Natali, Denise. *The Kurdish Quasi-State*. Syracuse University Press, 2021.

Orhan, Oytun. "Turkey's Cross-Border Military Operations in Northern Iraq." ORSAM Report, no. 268, 2021.

Özdemir, Mehmet. "Turkey's Intervention in Syria: A Strategic Approach to the Kurdish Question." *International Relations Journal*, vol. 11, no. 1, 2020, pp. 112–128.

Öztürk, Ahmet Erdi. "Turkey's Cross-Border Operations in Iraq: Legitimacy, Strategy, and Regional Reactions." *Middle East Policy*, vol. 28, no. 4, 2021, pp. 68–81.

Republic of Turkey Ministry of Defence. Press Release on Joint Patrols. 2021.

Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs. Turkey's Position on the PKK/YPG Issue. 2021.

Republic of Turkey Ministry of National Defence. Press Release on the Claw-Eagle and Claw-Tiger Operations. 2020.

Republic of Turkey Ministry of National Defence. Press Release on Cross-Border Operations. 2021.

Republic of Turkey Ministry of National Defence. Press Release on the Claw-Lock Operation. 2022.

Republic of Turkey Ministry of National Defence. Press Release on Cross-Border Operations. 2023.

Stein, Aaron. Turkey's Border Policy in Northern Syria. Atlantic Council, 2022.

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI). Sinjar Agreement Overview. 2020.

U.S. Department of State. Foreign Terrorist Organizations. 2022.

Zarakol, Ayşe. "Media and the Construction of Security Narratives in Turkey." *Middle East Critique*, vol. 29, no. 3, 2020, pp. 267–285.